



DEBAT PUBLIK PILKADA DKI JAKARTA DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH

Debora Sanur*)

Abstrak

Debat publik yang difasilitasi oleh KPUD DKI Jakarta merupakan salah satu bagian dari kampanye pilkada. Debat publik bertujuan agar pasangan calon dapat menyampaikan pesan kampanyenya secara efektif kepada masyarakat. Debat publik juga bertujuan untuk menginspirasi pemilih, serta mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi masyarakat yang belum mantap dengan pilihan pasangan calonnya (undecided voters/swing voters). Pada masyarakat Jakarta, swing voters yang merupakan pemilih rasional cenderung akan dipengaruhi oleh visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan calon. Mereka lebih menyukai pemaparan program kerja yang memberi solusi, realistis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, debat publik menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta telah menyelenggarakan debat publik pertama terhadap 3 pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anis-Sandi). Debat pertama tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2017, dan selanjutnya akan diadakan pada tanggal 27 Januari 2017 dan 10 Februari 2017. Debat publik ini merupakan salah satu strategi kampanye yang diperintahkan oleh UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan KPU No. 12 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPUD DKI Jakarta juga telah menentukan beberapa tema dalam pelaksanaan debat publik tersebut. Tema yang diusung pada debat pertama ialah masalah sosial ekonomi, lingkungan dan transportasi, serta pendidikan. Selanjutnya, tema pada debat kedua ialah masalah reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta

*) Peneliti Muda Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: debora.sanur@dpr.go.id

penataan kawasan perkotaan. Sedangkan tema untuk debat ketiga belum diumumkan secara resmi oleh KPU DKI Jakarta.

Debat publik ini merupakan salah satu bagian dari kampanye pilkada yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU DKI Jakarta. Tujuannya ialah agar pasangan calon dapat menyampaikan pesan-pesan kampanyenya secara efektif kepada masyarakat. Selain itu, debat publik juga bertujuan untuk menginspirasi pemilih, menggiring pemilih menjadi lebih rasional serta mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi masyarakat yang belum mantap dengan pilihan pasangan calonnya (*undecided voters atau swing voters*). Oleh sebab itu, dalam debat penting bagi para paslon untuk menguasai setiap pesan yang akan disampaikan, mampu mengemukakan argumentasi secara logis, dan mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang mendukung materi yang disajikan (Cangara, 2011: 290). Dengan demikian, debat publik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dalam pilkada.

Pemilih Loyal dan *Swing Voters*

Dalam pemilihan umum, mendapatkan dukungan dari pemilih adalah langkah strategis untuk memperoleh suara. Namun demikian, hanya pemilih loyal yang secara signifikan dapat menggambarkan potensi suara yang akan diraih pasangan calon. Sayangnya, seringkali pemilih yang masih ragu-ragu (*swing voters*) dalam memberi dukungan jumlahnya dapat lebih banyak dari pemilih yang loyal.

Terkait kecenderungan jumlah pemilih loyal dan *swing voters* dalam pilkada DKI Jakarta 2017, Litbang Kompas telah melakukan survei yang mengkategorikan pemilih berdasarkan tingkat loyalitas pilihan. Survei tersebut menemukan bahwa dari sisi karakter pemilih, walaupun seorang pemilih sudah menentukan dukungannya terhadap satu paslon namun dukungan tersebut memiliki tingkat loyalitas yang berbeda. Berdasarkan survei tersebut, pemilih yang menyatakan masih mungkin berubah pilihan, ragu-ragu dan tidak menjawab bagi paslon Anies-Sandi sebesar 45,5%, Agus-Sylvi 44,1%, dan Ahok-Djarot 38,3% dari seluruh responden yang sudah menyatakan dukungan terhadap satu

paslon tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa pemilih yang ragu dan dapat berubah pilihannya cenderung hampir sama banyaknya dengan yang pemilih yang loyal.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diuraikan dalam beberapa kelompok. Menurut Eep Saifullah Fatah (Efriza, 2012: 487), secara umum pemilih dikategorikan ke dalam 4 (empat) kelompok utama, yaitu: *pertama*, Pemilih Rasional Kalkulatif, yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. *Kedua*, Pemilih Primordial, yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan alasan agama, suku, ataupun keturunan. *Ketiga*, Pemilih Pragmatis, yang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi secara pribadi dari paslon kepada pemilih. *Keempat*, Pemilih Emosional, yang cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Misalnya, perasaan iba atau alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat.

Bagi pemilih loyal yang sudah menentukan pilihannya terhadap paslon tertentu, mereka tidak dapat memberi penilaian yang objektif terhadap debat publik. Mereka hanya akan menyukai argumen paslon yang dapat menguatkan pendapatnya terhadap paslon yang ia dukung. Debat publik tidak akan mempengaruhi pilihannya terhadap paslon yang akan ia pilih. Hal ini berbeda dengan *swing voters* yang rasional. Bagi mereka debat publik dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memilih paslon.

Oleh sebab itu, pelaksanaan debat publik terutama adalah upaya dalam memperebutkan suara *swing voters*. *Swing voters* yang cenderung berasal dari kalangan pemilih pemula, mungkin akan berubah pilihan karena pengaruh lingkungan, teknologi digital, maupun pengaruh tokoh masyarakat. Sementara itu, *swing voters* yang merupakan pemilih rasional cenderung akan dipengaruhi oleh visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan calon. Para *swing voters* ini akan terus menilai kapasitas tiap kandidat calon hingga hari-H pemilihan.

Dari pengalaman Pilpres 2014 dan Pilgub 2012, masyarakat pemilih di Jakarta memiliki karakter rasional, terbuka, dan memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Oleh karenanya, Jakarta memiliki jumlah *swing voters* yang paling banyak

bila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center pasca debat publik yaitu pada tanggal 14-19 Januari 2017 yang menemukan bahwa responden yang belum menentukan pilihannya (*undecided voters*) sebanyak 9,8%. *Undecided voters* ini meningkat bila dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada Desember 2016. Saat itu survei tersebut menemukan bahwa jumlah *undecided voters* sebesar 8,5%. Peningkatan *undecided voters* memberi sinyal bahwa debat publik telah membuat pemilih menjadi lebih rasional dan cenderung menantikan debat kedua dan ketiga sebelum memilih pada hari pemilihan.

Efektivitas Debat Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Debat publik merupakan salah satu bagian dari kampanye menjelang pemilihan kepala daerah yang bertujuan agar masyarakat pemilih dapat mengetahui kapasitas, integritas serta kepemimpinan setiap paslon. Dalam hal ini debat publik merupakan kesempatan yang baik bagi para paslon untuk berkomunikasi dengan masyarakat pemilihnya mengenai segala aspek terutama terkait kesiapan paslon terhadap program kerjanya.

Secara umum, pilkada diharapkan dapat berjalan dengan rasional sehingga masyarakat akan memilih berdasarkan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan oleh setiap paslon. Menurut Firmanzah, ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. *Pertama*, kondisi awal pemilih yaitu karakteristik yang melekat dalam diri pemilih di antaranya sistem nilai, keyakinan, kepercayaan serta kemampuan yang berbeda-beda. *Kedua*, faktor media massa yang dapat mempengaruhi opini publik seperti berita dan iklan politik, pendapat para ahli, maupun hasil survei. *Ketiga*, faktor parpol atau kandidatnya, pemilih akan menilai *track record*, citra, ideologi dan kualitas kandidat dengan pandangan si pemilih (Firmanzah, 2007: 89).

Pada masyarakat Jakarta, para *swing voters* ini biasanya lebih diisi masyarakat terdidik yang lebih bisa menerima pemaparan program kerja yang memberi solusi, logis, dan runut. Sehingga, sejumlah hasil lembaga

survei menemukan bahwa tidak adanya paslon yang cenderung memiliki elektabilitas dominan hingga memperoleh dukungan 50%. Oleh sebab itu, pemilih yang masih ragu dan belum memiliki pilihan dapat dipengaruhi dari hasil debat publik.

Dalam Pilkada, petahana bisa diuntungkan dengan pengalaman yang mereka miliki selama memimpin suatu daerah. Demikian pula dengan paslon Ahok-Djarot sebagai petahana bisa diuntungkan dengan pengalaman yang mereka miliki selama memimpin Jakarta. Namun di sisi lain, debat publik juga sekaligus membuka kesempatan bagi paslon Agus-Sylvi dan Anies-Sandi untuk menampilkan program tandingan yang lebih baik. Walau demikian, berdasarkan beberapa program kerja unggulan para paslon pada debat pertama, belum muncul inovasi atau hal-hal baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta.

Pada debat pertama, terkait dengan program lingkungan, paslon Ahok-Djarot mengklaim bahwa dalam kepemimpinannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menata dan menormalisasi sungai serta memindahkan warga di bantaran sungai ke permukiman yang layak. Program tersebut akan mereka lanjutkan bila mereka menjabat kembali. Adapun paslon Agus-Sylvi dan Anies-Sandi belum menyampaikan kebijakan alternatif dari kebijakan yang telah dan sedang dijalankan oleh petahana Ahok-Djarot.

Dalam pemaparannya, paslon Agus-Sylvi menyatakan akan membangun dan menata Jakarta sebagai kota yang berwawasan lingkungan tanpa melakukan pengusuran terhadap warga. Bahkan paslon tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pengusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Tetapi dalam pernyataannya belum dijelaskan secara detail bagaimana membangun kota berwawasan lingkungan tersebut. Sementara itu, Paslon Anis-Sandi menyatakan akan melakukan penataan ulang tanpa melakukan pengusuran serta akan memperhatikan hak masyarakat dengan mengajak masyarakat bermusyawarah. Namun paslon tersebut juga belum menjelaskan implementasinya secara rinci dalam melaksanakan program tersebut.

Debat publik pertama yang telah diselenggarakan memang belum terlalu memengaruhi pilihan para *swing voters*.

Debat perdana belum bisa dijadikan tolok-ukur dalam merubah arah pilihan para *swing voters*. Namun, pada debat berikutnya setiap paslon perlu untuk lebih memaparkan program yang mudah diterima serta mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat Jakarta, sehingga mampu menarik pilihan para *swing voters*.

Penutup

Debat publik terhadap paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diselenggarakan KPU merupakan salah satu strategi kampanye yang penting. Debat publik ini penting karena perannya dalam memastikan pemilih yang telah mendukung salah satu paslon tidak berpindah mendukung dan memilih paslon lainnya. Melalui debat, para paslon dapat menjelaskan programnya secara detail kepada masyarakat sehingga akan efektif untuk meraih suara *swing voters*.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus para paslon dalam merebut suara *swing voters*. Salah satunya adalah dengan menampilkan gagasan dan program yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Dalam hal ini, *swing voters* perlu diyakinkan dengan cara paslon memaparkan solusi secara teknis untuk setiap permasalahan yang ada di Jakarta. KPUD sebagai pihak penyelenggara debat juga perlu meningkatkan kualitas debat, agar debat semakin memancing minat masyarakat.

Mengingat besarnya peran debat publik sebagai bagian dari kampanye dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, Pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat memberikan perhatian khusus mengenai kampanye di dalam pengaturan regulasi. Dalam draft RUU Penyelenggaraan Pemilu, sebagai revisi UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, kampanye dan debat publik perlu mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan dalam pengaturan sebelumnya. Dukungan DPR RI terhadap ketentuan ini sangat diharapkan.

Referensi

- “Debat panas rebut kursi Jakarta: Agus, Ahok, Anies Siapa Unggul?”, <http://www.bbc.com/indonesia/live/indonesia-38610882>, diakses 23 Januari 2017.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Badung: Alfabeta.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hafied Cangara. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- “Pemilih Loyal Menjadi Kunci”, *Kompas*, 21 Desember 2016.
- Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- “Populi Center: Agus-Sylvi 25,0 Persen, Ahok-Djarot 36,7 Persen, Anies-Sandi 28,5 Persen”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/22/16323891/populi.center.agus-sylvi.25.0.persen.ahok-djarot.36.7.persen.anies-sandi.28.5.persen>, diakses 23 Januari 2017.
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.